



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya tidak lepas dari aspek komunikasi. Komunikasi terjadi dalam setiap interaksi antar manusia dari perorangan hingga kelompok. Komunikasi merupakan kebutuhan yang bukan hanya percakapan sederhana, tapi komunikasi juga dilakukan antar kelompok, atau perusahaan, atau organisasi yang masuk dalam tatanan masyarakat.

Dalam bidang komunikasi di lingkup pemerintahan, kegiatan *media relations* adalah bagian dari humas/*public relations* eksternal yaitu proses komunikasi kepada publik, publik yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan *media relations*, dalam kajian ilmu komunikasi *media relations* merupakan bagian terkecil dari proses komunikasi oleh *public relations* kepada publik, dalam mengkomunikasikan segala informasi tentang segala kepentingan perusahaan.

Salah satu tugas humas pemerintah dalam *media monitoring* ialah mampu menjalin hubungan baik dengan media massa guna menunjang tugasnya sebagai corong informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Media merupakan publik eksternal yang menjadi sarana komunikasi antara humas dengan publik, melalui kerjasama dengan media massa, humas dapat menginformasikan kepada publik mengenai kebijakan-kebijakan yang ada. Humas pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik sehingga humas di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memposisikan sebagai gerbang informasi bagi masyarakat dan media.

*Media relations* dalam institusi pemerintah sangat penting dan merupakan salah satu cara yang diterapkan dalam kegiatan kehumasan serta media yang jangkauannya sangat luas dan hampir semua aspek masyarakat bisa mengetahuinya hanya dengan media. Melalui media penyebaran informasi semakin meningkat dengan kredibilitas yang tinggi, sebab media dianggap objektif dalam publisitas, saat ini *media relations* masih memegang peranan yang

sangat penting dalam membentuk sebuah opini publik serta pencitraan dalam suatu organisasi, perusahaan, maupun institusi pemerintah. Menurut Lesly (2012, h. 42), *media relations* merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan langsung dengan media komunikasi untuk melakukan adanya publikasi atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi.

*Media relations* berfokus pada menjaga hubungan baik dengan media. Menjaga hubungan baik dengan media merupakan salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan citra positif sebuah perusahaan. Menurut Barbara Averill dalam buku Yosali Iriantara (2011, h. 28), *media relations* merupakan bagian terpenting dalam *public relations*. Bisa menjadi sebuah perangkat yang sangat efisien, begitu kita menyusun sebuah pesan yang bukan saja diterima tetapi dipandang penting oleh media lokal. Dan peran tersebut sangat penting bagi perusahaan itu sendiri. Menurut Dasrun Hidayat (2014, h. 69), kegiatan *media relations* untuk memperoleh pemuatan dan penyiaran secara maksimal tentang informasi *public relations* yang disampaikan untuk memberikan pengetahuan dan menciptakan pengertiannya.

Dalam institusi pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sangat membutuhkan *media relations*, karena bisa membantu dalam membangun dukungan publik dan memobilisasikan opini publik untuk sebuah organisasi, serta menjalin hubungan dengan berbagai media untuk mendorong sebuah komunikasi dua arah terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Aktivitas di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam lingkup Direktorat Perikanan divisi Sub. Bagian Humas, Bagian Hukum, kerjasama dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yakni *media monitoring* dalam menganalisis tentang informasi mengenai perikanan budidaya atau informasi mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya, melakukan kunjungan ke beberapa wilayah Indonesia untuk melakukan penanaman benih atau pemberian dana sebagai tindak lanjut budidaya perikanan, memberikan atau membuat laporan melalui lisan maupun tertulis kepada atasan secara teratur mengenai kegiatan

rencana kunjungan, hasil kunjungan, dan evaluasi kunjungan. Membuat *leaflet* dan infografis untuk memberikan informasi ke masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau informasi mengenai biota dan endemik laut. Melakukan *press conference* yang tujuannya untuk memberikan informasi penting kepada media-media yang nantinya akan dimuat pada media massa mengenai informasi berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

*Media relations* yang dilakukan dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menganalisis sebuah pemberitaan atau isu-isu di luar maupun di dalam Institusi pemerintah mengenai hal yang bersifat positif atau negatif dan berusaha untuk meningkatkan citra. Berdasarkan latar belakang penulis ingin mengetahui aktivitas *media relations* di Kementerian Kelautan Republik Indonesia.

## **1.2. Tujuan Kerja Magang**

Tujuan dari kerja magang ini adalah untuk mengetahui peran dan aktivitas *media relations* di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

## **1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

### **1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang berlangsung selama 60 hari kerja, terhitung dari Februari 2019 dan berakhir pada April 2019. Dilaksanakan pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berlokasi Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110 dan penulis ditempatkan pada Sub Bagian Humas, Bagian Hukum, Kerjasama dan Humas, Sekretariat DJPB (DJPB).

Waktu kerja magang Senin sampai Kamis dimulai pada pukul 07.00–15.00 WIB, dan Hari Jumat dimulai pada pukul 07.00–15.30 WIB.

### **1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Magang**

Prosedur pelaksanaan praktik kerja magang yang penulis lakukan adalah:

1. Penyelesaian surat (KM 01) untuk Ketua program Studi Ilmu Komunikasi.
2. Penyerahan CV kepada Institusi Pemerintah dan penyerahan (KM 02) Kasubag Humas KKP.
3. Penerimaan surat praktik kerja magang, dan penyerahan kepada pihak universitas untuk pengambilan (KM 02–KM7).
4. Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 60 hari.
5. Proses pembuatan laporan magang, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Bertha Sri Eko M., M.Si.